

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja otonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2008 sudah baik, karena pencapaian kerjanya telah memenuhi target yang terdapat pada indikator dalam PP No. 6 Tahun 2008.

1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pencapaian kinerja pada aspek ini sangatlah baik. Bahkan penulis dapat mengatakan bahwa Kabupaten Bantul telah berhasil meningkatkan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat. Peningkatan yang paling baik, misalnya. Ditunjukkan melalui pertumbuhan PDRB pada harga berlaku, dimana pertumbuhannya meningkat sebesar 3,72%. Diketahui pada tahun 2007 pertumbuhannya 12,01%, sedangkan pada tahun 2008 mencapai 15,73%.

Namun, disamping pencapaian kinerja yang memuaskan tersebut, terdapat pula kinerja yang dapat dikatakan belum cukup baik. Dalam hal ini angka kriminalitas yang tertangani mengalami penurunan dari 4,59 pada tahun 2007 menjadi 4,28 pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang diselesaikan oleh kejaksaan

mengalami penurunan sebesar 3,92%. Pada tahun 2007 perkara yang tertangani oleh kejaksaan sebanyak 382 kasus, sementara itu pada tahun 2008 turun menjadi 367 kasus.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Bantul sangat konsern terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya, yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan PDRB. Dengan hasil ini, dampaknya akan berpengaruh pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang semakin baik. Namun penurunan angka kriminalitas yang tertangani, menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan masalah kriminal. Menurut penulis, hal ini dipicu oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.

2). Aspek Pelayanan Umum

Penulis menyimpulkan bahwa capaian kinerja pada aspek ini, cukup baik, hanya saja masih kurang baik jika dibandingkan dengan dua aspek yang lain. Karena banyak indikator yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun bukan berarti tidak ada capaian yang mengalami peningkatan dalam aspek ini. Misalnya saja, peningkatan jumlah perpustakaan sebesar 0,46%. Diketahui pada tahun 2007 terdapat 644 perpustakaan, sedangkan pada jumlahnya bertambah menjadi 647 perpustakaan pada tahun 2008.

Capaian kinerja yang belum cukup baik, seperti jumlah pengunjung perpustakaan. Karena mengalami penurunan hingga 9,7%.

Diketahui pada tahun 2007 tercatat sebanyak 32.639 pengunjung perpustakaan. Sedangkan pada tahun 2008, jumlahnya menurun menjadi 29.472 pengunjung.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bantul telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan. Penambahan jumlah perpustakaan tersebut merupakan bukti pemerintah dalam mengupayakan peningkatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan. Karena di perpustakaan daerah Kabupaten Bantul, jumlahnya pengunjungnya mengalami penurunan. Menurut penulis, hal ini dikarenakan sistem tata kelola perpustakaan daerah yang masih kurang baik, terutama dalam penyediaan sistem komputerisasi secara otomatis.

3). Aspek Daya Saing Daerah

Dari aspek daya saing daerah, peningkatan paling baik ditunjukkan oleh peningkatan jumlah bank. Peningkatannya mencapai angka 34,09%. Diketahui pada tahun 2007 terdapat 58 Bank, sementara jumlahnya meningkat sebanyak 30 bank dalam satu tahun. Yakni menjadi 88 bank pada tahun 2008. Sedangkan capaian kinerja yang kurang baik adalah angka kriminalitas, karena mengalami peningkatan dari 6,88 pada tahun 2007 menjadi 7,43 pada tahun 2008. Diketahui pada tahun 2007 terdapat 573 tindak kriminal, meningkat 10,04% menjadi 637 pada tahun 2008.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan sarana bank, sebagai penyedia kredit usaha untuk rakyat. Sehingga mampu menciptakan pemerataan pendapatan dengan baik. Namun pemerintah Kabupaten Bantul dirasa masih kurang memberikan perhatian terhadap masalah kriminal. Menurut pandangan penulis hal ini dikarenakan kurang koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menekan angka kriminalitas, pemerintah Kabupaten Bantul perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Yang dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli keliling.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih meningkatkan sistem pengelolaan perpustakaan daerah. Dalam kaitannya dengan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan daerah. Pemerintah perlu melakukan perubahan dan inovasi terhadap tata kelola perpustakaan daerah. Yang dapat dilakukan dengan menyediakan sistem komputerisasi yang dapat diakses secara otomatis oleh pengunjung.

3. Untuk meningkatkan kinerja setiap instansi. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyediakan reward and punishment bagi para pegawai pemerintahan.
4. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya, pemerintah Kabupaten Bantul mampu meningkatkan kinerjanya di berbagai aspek secara perlahan tetapi pasti.
5. Hasil evaluasi kinerja ini dapat digunakan untuk melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). Tata cara pelaksanaan EKPOD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu hasil EKPOD disampaikan oleh Timnas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk bahan pertimbangan kebijakan penghapusan dan penggabungan daerah, yang selanjutnya diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007.